

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI  
DAN ASPIRASI POLITIK  
DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA  
(THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN PARTICIPATION AND  
POLITICAL ASPIRATION IN THE VILLAGE GOVERNMENT  
LEVEL)**

**Oleh:  
Itok Wicaksono\***

**\*Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember**

***Abstract***

*The results of the research indicate that community participation in the election of village heads in the three villages studied is always higher than the participation of the community in the other elections held in the village. The main reason for this is the familiar local figure and there is no denying the involvement of other parties who are often referred to as bebotoh in the Village Head Election. The results of this study also indicate that there is a large mass-based political party in each village (research location) but does not participate in the process of influencing influence on the title of Village Head Election. The political party is the National Awakening Party, almost never participating in the battle of Village Head Election in the village of Sruni, Kawang Rejo Village or in Selodakon Village.*

***Keywords: Political Parties, Political Participation, Political Aspirations and Village Governance***

### **Abstrak**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di tiga desa yang diteliti selalu lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu yang lain yang diselenggarakan di desa. Alasan utamanya karena figur lokal yang sudah dikenal dan tidak dipungkiri ada keterlibatan pihak lain yang sering disebut sebagai bebotoh dalam Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada partai politik yang berbasis massa besar di masing-masing desa (dilokasi penelitian) tapi tidak ikut serta dalam proses pengaruh mempengaruhi pada gelaran Pemilihan Kepala Desa. Partai politik tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa, hampir tidak pernah ikut serta dalam pertarungan Pemilihan Kepala Desa di desa Sruni, Desa Kawang Rejo maupun di Desa Selodakon.

**Kata Kunci: Partai Politik, Partisipasi Politik, Aspirasi Politik dan Pemerintahan Desa**

## **I. PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi ini, ditandai dengan munculnya banyak partai. Perkembangan partai politik di Indonesia tidak hanya mewarnai perkembangan demokrasi di tingkat pusat pemerintahan Negara, tetapi juga mewarnai sampai ke tingkat pemerintahan daerah dan desa. Hal ini mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran representasi dari peran rakyat dalam percaturan politik. Dengan kata lain, kehadiran partai politik ini merupakan cerminan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara teoritis, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi seluruh rakyat untuk ikut berpartisipasi menyalurkan aspirasi dan kepentingannya serta meraih peluang untuk memperjuangkan hak-hak politik dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu pilar demokrasi yang sangat strategis, peran partai politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perannya di tingkat pemerintahan desa. Ditingkat pemerintahan desa seharusnya partai politik juga dapat melakukan peran partisipasi dan aspirasi politik. Peran partisipasi politik ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif. Dan, secara lebih spesifik lagi peran parpol ini dapat juga dilakukan dengan cara melakukan proses seleksi calon kepala desa. Sedangkan peran aspirasi politik dapat dilakukan partai politik dengan cara menyampaikan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat desa melalui proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan pelaksanaan pemerintahandesa.

Sayangnya, dalam prakteknya kedua peran tersebut hingga saat ini belum bisa dilaksanakan secara baik. Dalam pandangan penulis, salah satu alasan paling mendasar mengapa peran tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik bisa ditelusuri dari ketentuan Undang Undang No. 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bila dianalisis secara mendalam ternyata tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang ini yang memberikan peluang fungsi peran partai politik di tingkat pemerintahan desa. Undang-Undang ini ternyata justru membatasi peran partai politik di tingkat pemerintahan desa. Misalnya, tidak ada

satu pasal pun yang mengatur fungsi partai politik dalam melakukan seleksi calon Kepala Desa dan juga tidak ada satu pasal pun yang mengatur fungsi partai politik terhadap penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Padahal pelaksanaan kedua fungsi ini dalam proses pemilu dan pembangunan sangat penting bagi masyarakat desa.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara substansial menghendaki adanya keterlibatan partisipasi seluruh elemen masyarakat (termasuk tentunya partai politik) dalam proses politik, pemerintahan dan pembangunan. Misalnya di dalam pasal 18 dinyatakan bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Dalam melaksanakan seluruh kewenangan tersebut seharusnya partai politik juga bisa memegang peran strategis dalam mengawal peran partisipasi dan aspirasipolitik.

Hal inilah yang menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia, yaitu belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik untuk rakyat. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik ditingkat pemerintahan desa perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas permasalahan yang

menarik diteliti disini adalah: (1) bagaimana keterlibatan peran partai politik dalam proses pemilihan Kepala Desa?, dan (2) bagaimana keterlibatan peran partai politik dalam pelaksanaan pemerintahan desa?

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk menggambarkan keterlibatan peran partai politik dalam proses pemilihan Kepala Desa; (2) untuk menggambarkan keterlibatan peran partai politik dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Partai Politik**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sementara ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai partai politik seperti : Carl J. Friedrich (dalam Sitepu, 2016:3) yang menyatakan partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan bersifat idiil dan materiil. Partai politik merupakan saekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang beertidak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Sigmund Neumann (dalam Bariroh, 2014:139139), menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Dari konsep tersebut, kita mengetahui bahwa partai politik adalah organisasi hasil bentukan masyarakat dengan dasar kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu terkaitmasya- rakat yang dicita-citakan.

Friedrich (dalam Artis, 2012:67) menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk

merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.

Selanjutnya, Soltau (dalam Artis, 2012:67) juga menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Suatu partai politik dapat timbul karena :

1. Sekumpulan orang bersama-sama mencintai orang atau keturunan dari orang tertentu dan melahirkan partai. Misalnya partai raja, Partai Bonaparte, namun partai-partai ini sudah hamper tidak ada di jaman sekarangini.
2. Sekumpulan orang mempunyai kepentingan yang sama seperti partai buruh, partai tani, dan lainsebagainya.
3. Adanya asas dan cita-cita politik yang sama seperti partai nasionalis, partai komunis dan lainsebagainya.
4. Adanya persamaan dalam kepercayaan
5. seperti partai islam, partai Katolik dan lain-lain (dalam Sitepu, 2016:3).

## 2.2 Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington dan Nelson, 1990:9-10).

Definisi partisipasi politik menurut Bolgherini (dalam Calise dan Lowi, 2010:169) bahwa partisipasi politik " ... a series of activities related to *political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious*" Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT  
PEMERINTAHAN DESA

Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini (dalam Calise dan Lowi, 2010:169), yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Luengo (2006) dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe* bahwa warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuaipan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson mungkin belum lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu. Misalnya, Magstadt (2012:273-82) menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: (1) Opini publik; (2) Polling; (3) Pemilihan umum; dan (4) Demokrasi langsung.

### 2.3 Aspirasi Politik

Pengertian aspirasi politik adalah keinginan atau usulan rakyat yang menyangkut masalah atau kebijakan politik. Aspirasi politik ini biasanya disampaikan kepada wakilnya di DPR atau DPRD. Para buruh menyampaikan aspirasi politiknya kepada DPR mengenai upah buruh minimal yang belum disahkan pemerintah (Kaelola,2009:28).

Aspirasi politik dapat juga diartikan sebagai keinginan atau usulan rakyat yang menyangkut masalah atau kebijakan politik. Aspirasi politik ini biasanya disampaikan kepada wakilnya di DPR atau DPRD. Para buruh menyampaikan aspirasi politiknya kepada DPR mengenai upah buruh minimal yang belum disahkan pemerintah

Kehadiran partai politik dari tahun ke tahun menjadi bukti berkembangnya kemampuan politic behavior dalam Indonesia. Perubahan yang terjadi dari setiap waktu membuktikan terciptanya proses demokrasi yang senantiasa berubah. Tak dapat diprediksi perkembangan ke depan. Namun satu hal mesti kita pahami dan upayakan hari ini dan seterusnya adalah fungsi dari keberadaan suatu partai politik dalam menyuarakan berbagai aspirasi rakyat. Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan yang akan datang. Adapun beraspirasi diartikan bercita-cita, berkeinginan, berhasrat. Pengertian rakyat adalah segenap penduduk suatu negara—sebagai imbalan pemerintah. Untuk itu aspirasi rakyat menurut KBBI diartikan sebagai harapan dan tujuan segenap penduduk suatu negara untuk keberhasilan yang akan datang (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/09/17/aspirasi-rakyat-dan-political-behavior/>).

Perlu ada kolaborasi yang kuat antara rakyat dengan keberadaan partai politik. Kehadiran partai politik semestinya menjadi kebahagiaan bagi rakyat, sebab dengan banyaknya partai politik peluang untuk menyalurkan harapan akan menjadi semakin mudah. Teori klasik dari Aristoteles menyatakan politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama sehingga lahirnya partai politik dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah yang sejalan dengan harapan rakyat. Hanya saja, saat ini kepercayaan rakyat untuk

berjalan bersama dengan partai politik tercoreng oleh beberapa perilaku pemain politik yang lupa akan tanggung jawabnya. Partai politik hanya menjadi kendaraan dalam berkuasa guna mencapai kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Membentuk kepercayaan rakyat terhadap parpol menjadi suatu rumusan masalah yang butuh kerja keras untuk menemukan solusinya. Namun langkah awal yang kemudian bisa mengubah persepsi rakyat adalah memberikan ruang pada rakyat, sebagai contoh berkunjung ke tempat-tempat yang butuh sentuhan, menggelar dialog terbuka, mendengar masukan dari rakyat. Sehingga terjalin komunikasi yang baik (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/09/17/aspirasi-rakyat-dan-political-behavior/>).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka secara khusus yang dimaksud dengan aspirasi politik dalam penelitian ini jika dikaitkan peran partai politik di tingkat pemerintahan desa adalah keterlibatan partai politik dalam menyampaikan aspirasi politiknya melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat pemerintahan desa.

#### **2.4 Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta mekanisme *check and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal



PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT  
PEMERINTAHAN DESA

tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahwa Pengaturan Desa berasaskan: a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan.

Lebih lanjut menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 pengaturan desa bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Hal yang perlu ditegaskan dari penjelasan diatas adalah bahwa setiap Pemerintahan desa di dalam wialyah Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan aspirasi, prakarsa dan kepentingan masyarakat desa. Partai politik tentunya juga harus ikut secara aktif dalam segala proses pengurusan pemerintahan di tingkat desa. Dalam hal ini partai politik di tingkat desa juga harus mampu menyampaikan aspirasi dan segala kepentingan masyarakat kepada pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Huntington (2003:513) menyatakan bahwa di hampir semua Negara berkembang (termasuk tentunya Indonesia), mayoritas penduduk biasanya merupakan mayoritas terbesar bermukim di wilayah pedesaan. Selanjutnya, di Negara-negara seperti ini, jumlah penduduk perkotaan bertambah jauh lebih cepat dibanding dengan penduduk

pedesaan yang sebagian besar diakibatkan adanya migrasi orang-orang desakekota. Kombinasi kedua kondisi ini mayoritas masyarakat desa dan pertumbuhan masyarakat kota telah menyebabkan meningkatnya perbedaan tegas pola politik di Negara-negara berkembang. Jurang perbedaan tersebut terlihat jelas dalam hal sikap-sikap dantingkah laku politik antara masyarakat desa dan kota. Kota menjelma menjadi pusat oposisi yang berlanjut terus terhadap sistem politik. Stabilitas pemerintahan dengan sendirinya sangat tergantung atas dukungan masyarakat pedesaan yang dapat dikerahkannya.

Selanjutnya Huntington (2003:516) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang kota tidak hanya merupakan pusat instabilitas; tetapi juga sebagai sentral oposisi terhadap pemerintah. Jika pemerintah hannya mendapatkan dukungan dan stabilitas dalam ukuran kecil, ia membutuhkan dukungan luas dari masyarakat pedesaan. Jika tidak ada pemerintah yang berhasil menarik dukungan dan simpati masyarakat pedesaan, stabilitas tidak akan pernah tercipta. Akhirnya, di Negara berkembang penganut system politik demokratis, akan tercipta pola pemilihan yang berbeda antara kota dan desa. Dukungan terhadap partai politik pemerintah, jika memang ada, datang dari pedesaan; Dukungan terhadap oposisi, muncul dari wilayah kota.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik di tingkat desa memiliki peran strategis dalam ikut mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Keterlibatan partai politik ini ikut menentukan berhasil tidaknya pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan.

## **2.5. Fungsi Partai Politik**

Secara teoretis parpol setidaknya memiliki lima peran atau fungsi yang semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik (Putra, dalam Metera, 2011:47-50).

### **1. Artikulasi Kepentingan**

Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa ber- beda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yangmemegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang

demikian akan memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya.

## **2. Agregasi Kepentingan**

Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terka- dang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan di- tinggalkan.

## **3. Sosialisasi Politik**

Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga nilai-nilai dan etika politik yang berlaku mempribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk Indonesia, nilai-nilai dan etika politik yang berlaku adalah yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kaelan, dalam Metera, 2011-48). Parpol yang tidak menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat.

## **4. Rekrutmen Politik**

Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabat- an-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemam- puannya berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa ber- demokrasi, bagaimana Parpol bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan ber- negara?

## **5. Komunikasi Politik**

Melalui komunikasi politik Parpol mengomunikasikan informasi, isu,

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT  
PEMERINTAHAN DESA

gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Sejalan struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal.

Muara dari semua peran Parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Pemilih yang rasional akan memilih Parpol yang mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Jika Parpol tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi yang demikian, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya yang rasional (Rachbini, dalam Metera, 2011:48). Karena itu Parpol se mestinya mulai meninggalkan cara-cara yang tidak rasional dalam memengaruhi pemilih. Sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat akan berubah dari irasional ke rasional dalam menentukan pilihan.

### III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di tiga (3) pemerintahan Desa di Kabupaten Jember, yaitu: (1) Desa Sruni Kecamatan Jenggawah, (2) Desa Kawang Rejo Kecamatan Mumbulsari dan (3) Desa Selodakon Kecamatan Tanggul. Penentuan lokasi ini ditetapkan secara purposive dengan pertimbangan bahwa ke tiga Desa tersebut dianggap mewakili semua Desa di Kabupaten Jember. Desa Sruni, Desa Kawang Rejo dan Desa Selodakon. Lokasi penelitian tersebut merupakan desa-desa yang cukup mewakili profile kebanyakan di desa di Kabupaten Jember, terutama dalam penggunaan bahasa yaitu bahasa madura dan jawa yang digunakan dalam dialeg Jemberan atau sering disebut bahasa campuran atau pendalungan ala jember..

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data atau informasi dari sumber data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berangkat dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi sosial tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

Semua data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer (sumber pertama) dan data sekunder (sumber kedua).

1. Data primer diperoleh dari para informan, yaitu pengurus partai politik di Kabupaten Jember dan Aparat pemerintah desa. Pemilihan informan ditentukan dengan metode *snowball*, yaitu penentuan informan yang dilakukan cara tidak menentukan berapa jumlah pasti informan, disini

peneliti terus akan menggali data atau informasi dari satu informan ke informan lain secara menggelinding dan akan berhenti menggali data atau informasi tersebut jika dianggap sudah mencukup untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, majalah, arsip- arsip, dokumen elektronik, peraturan perundang-undangan yang releva dan lain- lain.

Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian digunakan teknik antara lain:

3. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan para informan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancaraterbuka.
4. Teknik dokumentasi, yaitu cara untuk mendapatkan data dari sumber kedua berdasarkan catatan-catatan atas dokumen yang ada.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif (non statistik), artinya data atau informasi yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian. Proses analisa data dimulai dari reduksi data, interpretasi data dan diakhiri dengan pemeriksaan keabsahandata.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Peran Parpol di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah**

Desa sruni kecamatan jenggawah termasuk wilayah dapil 4 dalam pembagian zona pada setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam sistem politik, pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Setiap struktur jadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi ini.

Di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah tempat penelitian ini dilakukan komunikasi parpol dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sangat baik, dilihat dari hubungan parpol dan pemerintah desa dalam pembangunan desa seperti ikut serta memberikan pendapat dalam musyawarah desa. Sedangkan komunikasi partai politik dengan masyarakat desa yaitu partai politik sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat.

Di Desa Sruni terdapat beberapa partai politik yang aktif dalam proses politik di desa dan proses pemerintahan desa, partai yang banyak pendukungnya adalah partai Golkar, Gerindra, PKB dan PDIP adalah partai politik yang terlihat melakukan komunikasi politik, baik dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa Sruni..

Informan penelitian Kepala Desa Sruni Bpk H. Nanang mengatakan bahwa: " hubungan pemerintah desa dengan orang parpol sangat baik di setiap musyawarah desa saya sebagai pemerintah desa selalu melibatkan orang partai untuk memberikan pendapatnya dalam proses pembangunan Desa Sruni. (wawancara , 11 april 2017).

Informan penelitian ketua PAC Golkar kecamatan jenggawah mengatakan bahwa: "komunikasi politik dengan pemerintahan desa sangatlah baik terbukti dalam setiap musyawarah desa perwakilan dari partai kami diundang untuk memberikan pendapatnya". (wawancara dengan Ketua PAC Golkar Kecamatan jenggawah. 15 april 2017).

Informan penelitian ketua PAC Gerindra kecamatan jenggawah mengatakan bahwa : " saya sebagai ketua PAC Gerindra selalu berkomunikasi baik dengan pemerintah desa (wawancara dengan Ketua PAC Gerindra Kecamatan jenggawah. 15 april 2017).

Informan penelitian Ketua PAC PDIP Kecamatan jenggawah mengatakan bahwa: "PDIP Jenggawah tidak ada masalah dengan pemerintah desa, apalagi dengan Desa Sruni, meskipun pak kades bukan kader PDIP".(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan jenggawah. 15 April 2017).

Informan penelitian masyarakat Desa Sruni Bapak Mislan mengatakan bahwa : " Proses pembangunan di desa memang dibutuhkan dari beberapa pihak untuk menjadi pengawal dalam pembangunan desa". (wawancara dengan masyarakat . 15 April 2017).

Jadi proses komunikasi politik dalam peran parpol dipemerintahan desa sruni sudah baik dan berjalan sesuai harapan dengan saling memberi pendapatnya antara partai politik dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan di Desa Sruni.

### **Komunikasi Parpol dengan masyarakat dan Pemilihan Kepala desa**

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT  
PEMERINTAHAN DESA

demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi Partai politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil dalam pemilihan kepala desa. Disamping itu parpol melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya dengan memanfaatkan partai politik .

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga seperti halnya dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap keberhasilan pemilihan kepala desa.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam keikutsertaan berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat diharapkan mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam hal tersebut parpol mempunyai peranan penting.

Informan penelitian Kepala Desa Sruni Bapak H. Nanang mengatakan bahwa: "Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan peran Partai Politik sangat baik terbukti dari keikutsertaan partai politik yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat desa tanpa ada kegaduhan, kedewasaan berpolitik ada di desa sruni. (wawancara dengan Bapak Kepala Desa, 11 April 2017)

Informan penelitian Ketua PAC PDIP Kecamatan Jenggawah mengatakan bahwa:

"Yaa dalam setiap pemilihan kepala desa orang-orang partai selalu berkomunikasi dengan masyarakat bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan memenangkan calon yang kami dukung".(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Jenggawah. 15 April 2017).

Informan penelitian tokoh masyarakat Bapak Hartono mengatakan bahwa: "Setiap akan ada pemilihan umum atau pemilihan kepala desa pihak partai politik selalu turun di masyarakat yang untuk memperoleh dan meminta dukungan

dengan masyarakat."(wawancara dengan masyarakat desa, 15 April 2017).

Proses politik dalam pemilihan kepala desa di Sruni sudah berjalan sebagaimana peranan partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari observasi yang saya lakukan dalam pemilihan-pemilihan kepala desa di desa-desa Kecamatan Jenggawah, parpol sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa terutama Partai PDIP, Gerindra dan Golkar, selalu memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya memberikan suara dalam proses berpolitik di desa Sruni.

#### **4.2 Peran Parpol di Desa Kawang Rejo**

##### **Peran Parpol Dalam Pemilihan Kepala Desa.**

Dalam pemilihan kepala desa di desa kawang rejo dalam proses politik menurut pengamatan yang saya lakukan sangat panas dari proses pemilihan hingga saat ini. Kepala desa yang saat ini menjabat adalah kepala desa yang memenangkan pemilihan kepala desa di dukung oleh dua partai yaitu partai Golkar dan Gerindra sedangkan pihak yang kalah di usung oleh PDIP tiga partai tersebut yang ikut dalam proses pemilihan kepala desa kawang rejo. dari data yang saya peroleh sebagian besar wilayah kawang rejo di dominasi oleh partai Gerindra dan Golkar sedangkan di wilayah PDIP hanya di dusun dauhan dari 4 dusun sedangkan partai-partai lainnya hanya sebagian kecil seperti PKB, PPP, dll

Dari keikutsertaan partai politik dalam pemilihan kepala desa di desa kawang rejo jadi saya lihat proses pembangunan desa kurang maksimal ada unrur menganak tirikan wilayah, pemerintah desa hanya mengutamakan proses pembangunan di wilayah berbasis pendukung kepala desa yaitu wilayah golkar dan Gerindra sedangkan di dusun dawuan yang berbasis PDIP proses pembangunan masih belum tersentuh.

Informan penelitian Kepala Desa Kawangrejo Bebet Budianto mengatakan bahwa:"kami pemerintah Kawang rejo akan selalu menjalankan pembangunan desa dengan maksimal.(wawancara dengan Bapak Bebet Budianto, 11 Januari 2017)

Informan penelitian ketua PAC Golkar Miftahul Rosi kecamatan mumbulsari mengatakan bahwa : "Dalam proses pemilihan kepala desa kawang rejo partai golkar mendukung pak bebet untuk memenangkan pemilihan kepala desa ". (wawancara dengan Ketua PAC Golkar Kecamatan Mumbulsari Bapak Miftahul rosi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian ketua PAC Gerindra Sutikno kecamatan mumbulsari



mengatakan bahwa : " yaa saya kemarin dalam pemilihan kepala desa kawang rejo mendukung pak bebet (wawancara dengan Ketua PAC Gerindra Kecamatan Mumbulsari Bapak Sutikno. 15 Januari 2017).

Informan penelitian Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Supardi mengatakan bahwa: "pihak PDIP dalam pemilihan kepala desa kemarin mendukung ibu agung akan tetapi kalah dalam merebutkan suara rakat".(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Bapak Supardi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian Anggota PAC PKB Kecamatan Mumbulsari Solihin mengatakan bahwa: "pihak PKB dalam pemilihan kepala desa tidak telalu bekecimpung di dalamnya".(wawancara dengan Ketua PAC PKB Kecamatan Mumbulsari Bapak Solihin. 15 Januari 2017).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa parpol dan pemerintah desa kawang rejo pemilihan kepala desa partai politik mempunyai peran besar di dalamnya terbukti pihak pendukung dari partai golkar dan Gerindra memenangkan pemilihan kepala desa yang sebagian besar di desa kawang rejo di dominasi oleh partai Golkar dan Gerindra.

### **Peran parpol dalam pemerintahan Desa**

Pengelolaan organisasi Partai Politik tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya, namun yang paling membedakan partai politik dengan organisasi lainnya adalah bahwa parpol memiliki kekuatan POLITIK yang dapat mempengaruhi berbagai bermasyarakat dalam tataran publik. Dengan karakteristik parpol yang memiliki kekuatan politik maka sudah tentu jajaran struktural partai harus memiliki pemahaman yg kuat mengenai tugas dan fungsi parpol dalam tingkatan administratif strukturalnya masing-masing dalam rangka menjalankan visi dan misi masing-masing parpol.

^Dalam konteks pelaksanaan Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah desa (pelaksana kekuasaan eksekutif) dan BPD (pemegang kekuasaan legislatif). Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi.

Dapat kita ketahui bahwa peran Partai Politik dalam pemerintahan desa sangatlah penting terutama dalam proses komunikasi dengan masyarakat dan juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Informan penelitian ketua PAC Golkar Miftahul Rosi kecamatan

mumbulsari mengatakan bahwa : "yaa partai Golkar di desa kawang rejoikut sertadalam setiap musyawarah desa perwakilan dari partai kami diundang untuk memberikan pendapatnya". (wawancara dengan Ketua PAC Golkar Kecamatan Mumbulsari Bapak Miftahul rosi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian ketua PAC Gerindra Sutikno kecamatan mumbulsari mengatakan bahwa: "yaa saya sebagai ketua PAC gerindra mumbulsai sealalu ikut dalam proses pembangunan desa (wawancara dengan Ketua PAC Gerindra Kecamatan Mumbulsari Bapak Sutikno. 15 Januari 2017).

Informan penelitian menurut Ketua PAC PDIP Bapak Supardi mengatakan bahwa: "Yaa, Partai PDIP selalu berkomunikasi dengan masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan sebagai pengawas dalam pemeintahan desa.". (wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Bapak Supardi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian menurut masyarakat desa Bapak Misbah mengatakan bahwa : "Yaa, fungsi parpol sebagai sarana kami masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kami, wawancara, 15 Januari 2017).

Jadi fungsi partai politik dalam penyelenggara pemerintahan desa yaitu sebagai sarana aspirasi masyarakat dan juga membantu pemerintahan desa dengan memberikan pendapat dalam proses pembangunan desa di desa kawang rejo kecamatan mumbulsari.

### **Pembangunan Desa tidak merata Karena Proses Politik**

Dalam proses politik hal apa saja pasti akan di lakukan dalam mencapai tujuan, dan proses balas budi politik. Dalam pembangunan desa kawang rejo proses pembangunan desa tidak merata di karnakan unsur politik, pemerintah desa Kawang rejo hanya mengutamakan pembangunan di daerah-daerah yang berbasis Golkar dan Gerindra sedangkan wilayah PDIP salah satu pendukung calon yang kalah yang terletak di dusun dawuhan tidak tersentuh oleh pembangunan. jadi hal ini mengakibatkan kesenjangan antar masyarakat di desa kawang rejo karena poses politik yang sudah berlalu masih di sangkut pautkan oleh pemerintah desa yang mengakibatkan pembangunan desa tidak merata.

Informan penelitian Sekertaris desa Kawangrejo Dodik hermawan mengatakan bahwa: "Yaa pembangunan desa masih sedang berjalan jadi wajar jika pembangunan masih belum merata". (wawancara dengan Bapak Dodik hermawan, 11 Januari 2017)

Informan penelitian ketua PAC Golkar Miftahul Rosi kecamatan mumbulsari mengatakan bahwa : "yaa pembangunan di desa kawang masih sedang berjalan dalam membangun desa". (wawancara dengan Ketua PAC Golkar

Kecamatan Mumbulsari Bapak Miftahul rosi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian ketua PAC Gerindra Sutikno kecamatan mumbulsari mengatakan bahwa: "yaa saya sebagai ketua PAC gerindra mumbulsai selalu mengikuti dalam proses pembangunan desa dan selalu memberi dukungan pemerintah desa (wawancara dengan Ketua PAC Gerindra Kecamatan Mumbulsari Bapak Sutikno. 15 Januari 2017).

Informan penelitian Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Supardi mengatakan bahwa: "Tadak pernah mas, di wilayah dauhan masih belum tersentuh pembangunan padahal sudah hampir 2 tahun berjalan poses pemerintahan" (wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Bapak Supardi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian masyarakat Desa Kawangrejo Bapak Misbah mengatakan bahwa: "Sepertinya pemerintah desa kawang rejo belum maksimal kalo dilihat dari pembangunan desa". (wawancara dengan masyarakat desa. 15 Januari 2017).

Dari data yang saya peroleh di atas data observasi dan wawancara pembangunan desa kawang belum maksimal di karnakan masih ada unsur politik di dalamnya.

### **Sosialisasi Politik**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama pemerintahan desa.

proses sosialisasi pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *'feedback'* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau *'intermediate structure'* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Seperti halnya di kecamatan Mumbulsari Sosialisasi partai politik sangat sering dilakukan terutama PDIP karena saya sendiri adalah orang Partai PDIP. Sosialisasi yang dilakukan PDIP kepada masyarakat dan juga pemerintah desa

sangat sering dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Mumbulsari akan visi dan misi partai. Dan juga kepada pemerintah desa untuk meningkatkan hubungan parpol dengan pemerintah desa agar penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Informan penelitian menurut Kepala Desa Kawang Rejo Bapak Bebet Budianto: "Yaa, pihak parpol sering bersosialisasi dengan kami membahas aspirasi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa."(wawancara dengan Bapak Bebet Budianto, 11 Januari 2017).

Informan Penelitian menurut Supardi menyatakan bahwa: "Yaa, kami selalu bersosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan juga menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa."(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Bapak Supardi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian ketua PAC Golkar Miftahul Rosi kecamatan mumbulsari mengatakan bahwa : "ya dalam proses sosialisasi partai golkar sering melakukan dengan pemerintah desa dan masyarakat desa". (wawancara dengan Ketua PAC Golkar Kecamatan Mumbulsari Bapak Miftahul rosi. 15 Januari 2017).

Informan masyarakat Bapak Misbah mengatakan bahwa : " Yaa, disini pernah ada sosialisasi dengan partai politik yang memberikan pemahaman kepada masyarakat desa agar lebih meningkatkan partisipasi dalam proses politik. Dan juga sebagai penghubung aspirasi masyarakat."(wawancara dengan masyarakat desa. 15 Januari 2017).

Sosialisasi politik bagi partai politik sangat penting untuk dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam proses berpolitik dan juga memberikan pengetahuan akan visi misi partai. Dan juga pemerintah Desa proses sosialisasi sangat di butuhkan dengan masyarakat desa, tokoh masyarakat dll agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai tujuan.

### **Sarana Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara / pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen

tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu proses politik. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti rekrutmen kepala desa di kecamatan Mumbulsari. Rekrutmen politik dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mumbulsari biasanya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang menginginkan untuk menjadi calon kepala desa dalam kata lain calon independen. Sedangkan peran partai politik dalam rekrutmen calon kepala desa tidak dilakukan karena proses pemilihan kepala desa tidak harus diusung oleh partai.

Informan penelitian menurut Ketua PAC PDIP Mumbulsari Supardi menyatakan bahwa : " Yaa, peran partai politik dalam pemilihan kepala desa hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan." (wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan Mumbulsari Bapak Supardi. 15 Januari 2017).

Informan penelitian tokoh masyarakat Bapak Hartono menyatakan bahwa : " Yaa, dalam proses pemilihan Kepala Desa di Kawang Rejo semua masyarakat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa tanpa harus dari orang partai politik." (wawancara dengan masyarakat desa. 15 Januari 2017).

Jadi proses rekrutmen dalam proses pemilihan kepala desa di desa Kawang Rejo tidak harus dari orang partai politik melainkan setiap orang bias mencalonkan sebagai kepala desa, jadi fungsi parpol dalam pemilihan kepala desa sebagai alat meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **4.3 Peran Parpol di Desa Selodakon Tanggul**

##### **Sarana Partisipasi Politik.**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan

beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi masyarakat di Desa Selodakon Kecamatan tanggul dalam pemilihan Kepala Desa biasanya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang menginginkan untuk menjadi calon kepala desa dalam kata lain calon independen. Sedangkan peran partai politik dalam rekrutmen calon kepala desa tidak dilakukan karena proses pemilihan kepala desa tidak harus diusung oleh partai.

Informan penelitian tokoh masyarakat Bapak Hartono menyatakan bahwa : " Yaa, dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Selodakon, semua masyarakat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa tanpa harus dari orang partai politik."(wawancara dengan masyarakat desa. 15 April 2017).

Partisipasi politik masyarakat di Desa Selodakon sangat rendah bahkan golputnya paling tinggi di Kecamatan tanggul dari jumlah keseluruhan masyarakat. Dalam proses pemilihan Bupati kemarin sudah terbukti partisipasi masyarakat setiap tahun cenderung menurun.

Dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Kawang Rejo masyarakatnya sangat antusias pihak-pihak lain selain parpol yang ikut terlibat dalam pemilihan kepala desa, sehingga peran partai politik kalah kuat oleh perang pihak lain yang ikut secara tidak langsung tapi cukup menentukan dalam pemilihan kepala desa.dengan proses pemilihan kepala desa. Dalam pilkades masyarakat tetap terlihat antusias dalam partisipasinya.

Informan penelitian menurut Ketua PAC PDIP mengatakan bahwa :

"Yaa, pihak partai sering bersosialisasi dengan masyarakat di setiap desa di Kecamatan tanggul yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum, meskipun masyarakat Desa Selodakon bisa jadi mempunyai pilihan lain."(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan tanggul. 15 April 2017).

Informan penelitian masyarakat desa Bapak Misbak mengatakan bahwa : " pemilihan kepala desa sangat berbeda dengan pemilu-pemilu yang lain, karena yang akan menjadi pemimpin hampir setiap hari bertemu di jalan mas.

."(wawancara dengan masyarakat desa. 15 April 2017).

### **Perbedaan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala desa dan Pemilihan Bupati di Desa Selodakon**

Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Selodakon pada tahun 2014. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Selodakon seperti acara perayaan desa.

Pada bulan desember 2015 Kemarin masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Jember secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, untuk memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Selodakon.

Setelah proses-proses politik selesai ada hal menarik yang patut kita angkat, dalam pemilihan kepala desa kemarin partisipasi masyarakat meningkat karena pemilihan kepala desa di anggap sebagai perayaan desa.

Informan penelitian Ketua PAC PKB Kecamatan tanggul mengatakan bahwa: "pihak PKB dalam pemilihan kepala desa tidak telalu berkecimpung di dalamnya mungkin karena seorang figur tokoh dalam pemilihan bupati hasil pemilihannya berbeda".(wawancara dengan Ketua PAC PKB Kecamatan tanggul. 15 april 2017).

Jadi kesimpulan yang saya ambil dari proses pengamatan dan proses wawancara hasil pemilihan bupati dan pemilihan kepala desa masyarakat desa Selodakon melihat dari figur seorang tokoh yang mempengaruhi hasil dari pemilu.

### **Parpol Pengatur konflik atau pemicu konflik**

Setiap wilayah memiliki potensi konflik tak luput di pungkuri wilayah kecamatan mumbulsari. Hal ini dikarenakan didalam setiap negara pasti memiliki masyarakat yang memiliki banyak perbedaan-perbedaan baik dari segi etnis, sosial ekonomi ataupun agama. Oleh karenanya disini partai di perlukan untuk membantu mengatasi atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karenanya peran partai politik tentunya dapat mencegah terjadinya konflik – konflik yang terjadi di masyarakat terutama saat pemilihan kepala desa .

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-

golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak dapat dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan.

Peran Partai politik di desa Selodakon sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan permusyawaratan desa diselodakon untuk mendapatkan penyelesaian konflik.

Informan penelitian menurut Ketua PAC PDIP menyatakan bahwa : “di setiap daerah memang rawan terjadi konflik apalagi dalam proses pemilu cara partai politik mengendalikan konflik dengan berdialog antara satu sama lain.”(wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kecamatan tanggul. 15 April 2017).

Informan penelitian Kepala desa Selodakon mengatakan bahwa: " di desa Selodakon sering terjadi konflik antar warga cara penyelesaiannya dengan dialog di balai desa dengan pemerintah desa jadi penengah. (wawancara dengan Kades , 11 April 2017).

Di kecamatan tanggul dari pengamatan yang saya (kepala Desa) lakukan mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa, Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tersebut. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Parpol dapat menjadi peredam konflik tapi sekaligus dapat menjadi pemicu konflik.



## V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hanya parpol yang mempunyai massa di desa tertentu saja yang berorientasi pada penggalan massa pemilih pada saat pilkades (Contoh kasus di desa Kawang Rejo kecamatan mumbulsari).bahkan sampai pada persaingan antar partai politik dalam rangka mencari dukungan pemilu legislatif.
2. Di Desa selodakon sangat menarik karena desa tersebut adalah desa yang golputnya paling tinggi di kecamatan tanggul. Parpol cenderung tidak punya daya pengaruh terhadap massa pemilih kalah dengan para bebotoh, yang sering kali dapat memenangkan pilkades. Kepala desanya sangat berpengaruh pada masyarakatnya tapi tidak tertarik dgn keberadaan parpol. BPDnya sangat lemah....tokoh masyarakatnya juga lemah.
3. Sedangkan di desa Sruni kecamatan jenggawah, kepala desanya sangat berkepentingan dgn orang2 parpol dan Kepala Desa sendiri tidak mau disebut sebagai orang partai tertentu dan tidak meminta dukungan pada saat pilkades. Kepala desa mempunyai orientasi pada kepentingan masyarakatnya untuk dapat memenuhi peningkatan kesejahteraan dari sisi program pembangunan. Membutuhkan partai politik, orang birokrasi dan tokoh masyarakat dan media untuk mengenalkan potensi desanya supaya mendapatkan program dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
4. Partisipasi masyarakat pemilih dalam Pilkades selalu lebih tinggi dibandingkan partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu yang lain yang diselenggarakan di desa. Alasan utamanya karena figur lokal yang sudah dikenal dan tidak dipungkiri ada keterlibatan pihak lain yang sering disebut sebagai bebotoh dalam Pilkades.
5. Ada Partai politik yang berbasis massa besar di masing-masing desa (dilokasi penelitian) tapi tidak ikut serta dalam proses pengaruh mempengaruhi pada gelaran Pilkades. Parpol tersebut adalah PKB, hampir tidak ikut serta dalam pertarungan Pilkades di desa Sruni, Desa Kawang Rejo maupun di Desa Selodakon.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal:

- Artis, 2012. *Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012
- Bariroh, Laili, 2014. *Positioning Ideologi Partai Politik Pada Preferensi Politik Santri*, Jurnal Review Politik, Volume 04, Nomor 01, Juni 2014
- Metera, I Gde Made, 2011. *peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Santun Dan Kesejahteraan Rakyat*, WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
- Bolgherini, Silvia, 2010. "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*, Chicago: The University of Chicago
- Huntington, Samuel P, dan Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: RinekaCipta
- \_\_\_\_\_, 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kaelola, Akbar, 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Kamus Istilah Politik Kontemporer cetakan pertama
- Luengo, Oscar G, 2006. *E-Activism New Media and Political Participation in Europe*, CONFines 2/4 agosto-diciembre
- Magstadt, Thomas M, 2012. *Understanding Politics*, Belmont: Cengage Learning
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik  
-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sitepu, Elisabeth, 2016. *Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.2 No.1 Januari 2016
- Yuliono, Anton. 2013. *Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya)* DIA, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 1, Juni 2013
- Profil Desa Sruni kecamatan Jenggawah, dokumen Desa Sruni  
Profil Desa Kawang Rejo kecamatan Mumbulsari, Dokumen desa kawang rejo  
Profil Desa Selodakon kecamatan Tanggul, dokumen desa Selodakon  
Data Base Profil Partai Politik Kabupaten Jember, Bangkesbangpol Kabupaten Jember 2016

### Dokemen Elektronik:

- <https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan,aspirasi+politik-adalah.xhtml>, diakses 20 Mei 2016)
- (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/09/17/aspirasi-rakyat-dan-political-behavior/>), diakses 21 Mei 2016